

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA 2019-2023



Kampus Ciputat, Lt. 2
Jl. Ciputat Raya No. 77, Cireundeu, Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan

Telp: +62217430930 ext: 213
Fax: +62217491100
Website: www.lp3m.stiead.ac.id
Email: lp3mstiead@gmail.com



RENCANA INDUK PENGEMBANGAN

PENGABDIAN MASYARAKAT STIE AHMAD DAHLAN JAKARTA

TAHUN 2019-2023

Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat
STIE Ahmad Dahlan Jakarta
2018



LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini telah dibaca, dievaluasi, dan dihearing-kan,
serta disetujui sebagai

“Dokumen RIP Pengabdian Masyarakat
STIE Ahmad Dahlan Jakarta”

Mengetahui,
Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Dr. Mukhaer Pakkamtha, SE., M.M.
NIP. 1969011420005011001

Kepala LP3M

Yudi Pandri, SE., M.Si.
NIDN: 0304077902

Tanggal Hearing: 08 Mei 2018

© LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Mei 2018

Dicetak di Kota Tangerang Selatan
All right reserved

Jl. Ciputat Raya, No. 77
Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
T: +62217430930
F: +6221791100
W: www.lp3m.stiead.ac.id
E: lp3mstiead@gmail.com

Right and Permissions

This material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permissions may be a violation of applicable law. For permissions to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to the copyright of Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Tujuan 2
1.3.	Manfaat 2
1.4.	Dasar Hukum 3
BAB II	DASAR PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT
2.1	Visi dan Misi 4
2.2	Pola Ilmiah Pokok 4
2.3	Kondisi Eksisting 5
2.4	Analisis SWOT 7
2.5	Prinsip dan Pendekatan 7
2.5.1	Prinsip dan Pendekatan Penyusunan RIP 7
2.5.2	Prinsip dan Pendekatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 8
2.6	Indikator Keberhasilan 9
BAB III	PETA JALAN PENGABDIAN MASYARAKAT
3.1	Isu-Isu Pengabdian Masyarakat 10
3.2	Rencana Strategis 13
3.3	Peta Jalan Target Capaian 13
BAB IV	PENUTUP 15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di samping pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara. Demikian juga sesuai Pasal 60 UU.No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengenai kewajiban dosen, dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. UU. No. 12/2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Di tingkat Persyarikatan Muhammadiyah, perihal kegiatan pengabdian masyarakat ini juga disebutkan dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Dalam Pasal 1 butir ke-4 dinyatakan bahwa “PTM berfungsi sebagai *center of excellence within the region (uswah hasanah*, pusat keunggulan) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pengabdian pada masyarakat serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.

Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), yang kemudian dikuatkan kembali melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49/2014, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi delapan standar sebagai berikut:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;

5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai standar minimal tersebut, sejak tahun 2016 Kemristekdikti RI mengevaluasi dan sekaligus memberi apresiasi atas kinerja kegiatan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap tiga tahun. Hasil evaluasi tersebut kemudian dipublikasi dengan mengelompokkan perguruan tinggi berdasarkan klaster unggul (*excellence*), sangat bagus (*very good*), memuaskan (*satisfactory*), dan kurang memuaskan (*marginal*).

Salah satu komponen penting dari penilaian tersebut adalah aspek kelembagaan dan tata kelola kegiatan pengabdian masyarakat. Adapun subkomponen yang dinilai adalah adanya dokumen perencanaan (*master plan*) dengan jangka waktu menengah (lima tahun). Dari perspektif kelembagaan dan tata kelola, keberadaan dokumen tersebut menjadi sangat penting bagi pengorganisasian dan penatakelolaan kegiatan pengabdian masyarakat. Dokumen tersebut menjadi dasar pijakan bagi setiap lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat selama kurun waktu lima tahun. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi dasar arah kebijakan dan sarana pengambilan keputusan dalam kegiatan pengabdian masyarakat untuk periode lima tahun yang akan datang. Untuk mencapai standar yang diinginkan oleh Kemristekdikti tersebutlah Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian Masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2019-2023 ini disusun.

1.2 Tujuan

1. Memberikan arah kebijakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2019-2023;
2. Memberikan arah pengambilan keputusan kegiatan pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2019-2023;

1.3 Manfaat

1. Berfungsi sebagai arah kebijakan dan dasar pengambilan keputusan kegiatan pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2019-2023
2. Berfungsi sebagai instrumen pijakan bagi tata kelola kegiatan pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2019-2023;
3. Sebagai instrumen monitoring dan sekaligus evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2019-2023;

4. Dari aspek teknis, dokumen RIP Pengabdian Masyarakat berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi penilaian kinerja pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta oleh Kemristekdikti RI.

1.4 Dasar Hukum

1. UU. No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU. No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP. No. 37/2009 tentang Dosen;
4. PP. No. 41/2009 tentang Tunjangan Profesi Guru, dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
5. PP. No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP. No. 60/1999 Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Penelitian
9. Peraturan Permendiknas No. 47/2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
10. Surat Keputusan Menkowsabngpan No. 38/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
11. Keputusan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
12. Permenristekdikti RI No. 20/2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Statuta STIE Ahmad Dahlan Jakarta;
15. Kode Etik Civitas Akademika (Dosen, Mahasiswa dan Karyawan) STIE Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2012;
16. Organisasi dan Tata Kerja STIE Ahmad Dahlan Jakarta;
17. RencanaIndukPengembangan STIE Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB II | **DASAR PENGEMBANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

2.1 Visi dan Misi

Visi: “mewujudkan STIE Ahmad Dahlan pada tahun 2020 sebagai perguruan tinggi unggulan yang mampu membangun insan berilmu, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia dalam bidang ekonomi syariah dan bisnis yang bereputasi nasional dan internasional”.

Misi:

1. Melaksanakan program pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya (perbankan dan keuangan, manajemen, akuntansi dan ekonomi Islam), bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dan berwawasan keindonesiaan, memperluas jaringan hingga bereputasi nasional;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian (pemberdayaan) masyarakat untuk meningkatkan ketajaman ilmu pengetahuan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu, teknologi dan seni sebagai manifestasi spirit KH. Ahmad Dahlan;
4. Mengembangkan jejaring sosial (*networking*) guna meningkatkan tata kelola dan kualitas STIE Ahmad Dahlan Jakarta, baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
5. Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara bertanggungjawab, mandiri, terpadu, serta meningkatkan kualitas

2.2 Pola Ilmiah Pokok

Pola ilmiah pokok kegiatan pengabdian kepada masyarakat diturunkan dari visi dan misi. Hal ini dilakukan tentu dalam rangka mencapai visi dan misi STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Pola ilmiah pokok ini juga digunakan dalam kegiatan penelitian dosen. Ilustrasi keterkaitan antara visi/misi, pola ilmiah pokok dan kegiatan pengabdian masyarakat tersaji dalam Gambar 1 di bawah ini. Adapun pola ilmiah pokok kegiatan pengabdian masyarakat adalah:

Tabel 1. Pola Ilmiah Pokok Kegiatan Pengabdian

Isu Pokok	Keterangan
Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan	Isu ini mencakup kegiatan pengabdian bidang keuangan dan perbankan, terutama pembinaan dan pengembangan Lembaga keuangan mikro keterkaitannya dengan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Manajemen	Isu ini mencakup kegiatan bidang manajemen secara luas. Target sasaran pada isu ini mencakup rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pelaku usaha lainnya serta komunitas, baik komunitas sosial maupun komunitas agama.

Tabel 1. Lanjutan

Isu Pokok	Keterangan
Kewirausahaan	Isu ini mencakup segala aspek tentang kewirausahaan yang meliputi pembinaan terhadap perubahan perilaku wirausaha, bantuan teknis, pengembangan pasar, pengembangan media pemasaran dan sejenisnya.
Ekonomi Syariah	Isu ini mencakup pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro syariah dengan mengaitkannya dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, komunitas sosial dan komunitas keagamaan.



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipayungi oleh visi dan misi STIE Ahmad Dahlan Jakarta, di mana kegiatan pengabdian masyarakat didasari oleh empat pola ilmiah pokok, yaitu: akuntansi, keuangan dan perbankan, manajemen, kewirausahaan dan ekonomi syariah.

Gambar 1. Pola Ilmiah Pokok Pengabdian Masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta

2.3 Kondisi Eksisting

Dari aspek tata kelola [*governance*], sejak tahun 2014 LP3M telah dan sedang melakukan pembenahan tata kelola penelitian. Aspek-aspek yang telah dibenahi antara lain penyediaan skema insentif dan disinsentif penelitian/pengabdian kepada masyarakat. Skema tersebut tertuang dalam regulasi formal yang di-SK-kan oleh Ketua STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Selain itu, dari sisi pendanaan kegiatan, melalui regulasi tersebut juga telah diatur pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat, baik kegiatan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok.

Namun demikian, dari sisi produktivitas dan produk hasil pengabdian masyarakat masih sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas dosen dalam

kegiatan pengabdian masyarakat menjadi penting dilakukan. Tabel 2 dan 3 di bawah ini menggambarkan kondisi eksisting pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta tahun 2015-2017.

Tabel 2. Kondisi Eksisting Tata Kelola dan Kelembagaan Pengabdian Masyarakat

No	Aspek Tata Kelola	Eksisting		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Sumber daya manusia	√		1 orang guru besar, 11 orang bergelar doktor.
2	Fasilitas penunjang organisasi	√		Ruang kantor, dilengkapi dengan komputer terakses ke internet berkecepatan baik.
3	Pusat studi	√		1. Pusat Kewirausahaan Ahmad Dahlan 2. Pusat Studi Desentralisasi dan Otonomi Daerah 3. Pusat Studi Pengendalian Tembakau
4	Website internet	√		www.lp3m.stiead.ac.id
5	Sentra HKI		√	--
6	Pendanaan kegiatan pengabdian	√		Pendanaan individu: Rp. 3.500.000 Pendanaan kelompok: Rp. 5.000.000
7	Kemitraan dengan pemerintah daerah/pusat	√		Dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan (2017)
8	Kemitraan dengan Lembaga nirlaba	√		Dilakukan dengan Transparency International (2017)
9	Rencana strategis		√	--
10	Prosedur operasional baku/SOP	√		Mengikuti SOP pelaksanaan penelitian.
11	Pelaksanaan seminar proposal	√		Mengikuti SOP pelaksanaan penelitian.
12	Pelaksanaan seminar hasil	√		Mengikuti SOP pelaksanaan penelitian.
13	Desk evaluasi internal	√		Mengikuti SOP pelaksanaan penelitian.
14	Monitoring dan evaluasi	√		Ada instrumen monitoring dan evaluasi.
15	Insentif	√		Diformalisasi ke dalam SK Ketua tentang insentif dan disinsentif penelitian/pengabdian.

Tabel 3. Kegiatan dan Produk Dosen Hasil Pengabdian Masyarakat

No	Keterangan	Tahun Akademik			
		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2017/2018
				[1]	[2]
1	Kegiatan pengabdian melalui pendanaan internal.	1	1	4	8
2	Kegiatan pengabdian melalui pendanaan eksternal, termasuk Kemristekdikti RI.	0	0	0	1*
3	Buku hasil kegiatan pengabdian.	0	0	0	0
4	HKI/paten hasil pengabdian.	0	0	0	0
5	Artikel ilmiah hasil pengabdian.	0	0	0	1
6	Berita <i>press release</i> hasil kegiatan pengabdian.	0	0	0	0
7	Buku profil daerah/komunitas/pelaku usaha hasil pengabdian ber-ISBN	0	0	0	0

Keterangan: * Program Pengembangan Kewirausahaan

Dari data kegiatan dan produk dosen hasil kegiatan pengabdian masyarakat masih jauh dari kondisi ideal. Namun demikian, tampaknya ada gejala peningkatan kegiatan pengabdian yang dilakukan sepanjang tahun 2015-2018. Berdasar eksisting tata kelola dan kelembagaan, LP3M seyogyanya cukup mampu meningkatkan produktivitas kegiatan pengabdian masyarakat. Dukungan tata kelola dan kelembagaan yang cukup baik menjadikan kegiatan pengabdian masyarakat dapat menjadi salah satu katalisator dalam upaya mewujudkan visi dan misi STIE Ahmad Dahlan.

2.4 Analisis SWOT

S	1. Aspek Pimpinan
	2. Aspek Pendanaan
	3. Sistem Penjaminan Mutu Internal
	4. Sarana dan Prasarana
	5. Dosen
	6. Mahasiswa dan Alumni
	7. Pusat Studi
	8. Kemitraan dan Jejaring
	9. Di lingkup lokal dan regional, STIE Ahmad Dahlan Jakarta cukup memiliki reputasi yang baik
	10. Tata kelola LP3M cukup baik
W	1. Kuantitas dan kualitas pengabdian
	2. Kompetensi dosen dalam menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan
	3. Kuantitas publikasi ilmiah rendah

O	1. Teknologi informasi dan perkembangannya
	2. pendanaan penelitian Kemristekdikti RI dan atau lembaga lainnya
T	3. Belum terfokusnya sejumlah perguruan tinggi di Tangerang Selatan untuk menggarap kemitraan dengan pemerintah lokal setempat
	1. Diterapkannya kebijakan pasar terbuka, terutama Asean Economic Community.
	2. Munculnya sejumlah perguruan tinggi di sekitar kawasan.

2.5 Prinsip dan Pendekatan

2.5.1 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan RIP

Penyusunan RIP didasari oleh prinsip-prinsip antara lain:

1. Berbasis *Regulation Driven*

Prinsip ini menjadi dasar utama penyusunan RIP. Tuntunan regulasi pemerintah (dalam hal ini Kemristekdikti RI) di mana RIP adalah salah satu indikator tata kelola dan kelembagaan yang baik. Penyusunan RIP *in line* dengan standar ketujuh dalam Permendikbud RI No. No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang tertulis “kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat”.

2. Berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM disebutkan bahwa: (1) PTM wajib memiliki ciri khas kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah yang diatur lebih lanjut dengan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi”.

3. Prospektif

RIP disusun didasarkan atas upaya merencanakan masa yang akan datang, termasuk target-target capaian beserta arah kebijakannya.

Pendekatan penyusunan dilakukan dengan pendekatan *bottom-up planning*. Pendekatan ini ditempuh dalam upaya menangkap berbagai aspirasi dosendalam upaya menyempurnakan program dan kegiatan yang terdapat dalam RIP.

2.5.2 Prinsip dan Pendekatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Di level praktis maupun metodologis, kegiatan pengabdian masyarakat merupakan proses memfasilitasi (*facilitating*), memediasi (*mediating*), mendampingi (*mentoring, coaching*), konsultasi (*consulting*), membimbing (*counseling*), memotivasi (*motivaiting*), melindungi (*advocating*), menginisiasi (*enabling*), menguatkan (*strengthening*), merekayasa/merancang bangun (*designing*) dan menginovasi (*innovating*) atau mengembangkan (*developing*) berbagai kelompok masyarakat yang teridentifikasi membutuhkan dan layak diberdayakan.

Karena umumnya kegiatan pengabdian masyarakat terintegrasi dengan penelitian (karena pengabdian secara generik adalah tindak lanjut dari hasil penelitian), maka

sifatnya aktif dan partisipatif. Artinya, aksinya bersifat menginisiasi dan menjemput bola, serta substansi dan metodenya disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat atau kelompok sasaran pengabdian yang dituju (*demand driven*). Banyak pendekatan yang diterapkan oleh para dosen dalam melaksanakan PPM, baik yang bersifat personal, kelompok maupun massal. Baik pendekatan yang bersifat searah (*top-down*) maupun yang partisipatif, baik yang parsial maupun yang integratif dan kolaboratif.

Adapun prinsip pelaksanaan pengabdian masyarakat di STIE Ahmad Dahlan mengacu pada:

1. Pengembangan komunitas

Prinsip pengembangan komunitas mencakup penyuluhan dan pemberdayaan. Prinsip ini wajib termaktub dalam setiap rancangan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen.

2. Keadilan sosial

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan semata-mata mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) dan masyarakat lemah, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan politik.

3. Inovatif

Kegiatan pengabdian masyarakat harus melahirkan inovasi dan kebaruan bagi praktik-praktik pembangunan pada kelompok masyarakat yang terlibat. Dalam hal itu, kegiatan pengabdian harus mampu mengubah persepsi masyarakat yang didampangi.

4. Menyelesaikan Masalah (*Problem Solving*)

Kegiatan pengabdian masyarakat harus mampu berperan sebagai penyelesai masalah (*problem solver*) yang dihadapi oleh sekelompok komunitas. Semakin baik derajat penyelesaian masalah kegiatan pengabdian, semakin bermutu pula kegiatan pengabdian tersebut.

5. Berorientasi pada produk

Seluruh kegiatan pengabdian harus dapat menghasilkan produk dan keluaran (*output*) yang terukur, misalnya prosiding pengabdian, artikel ilmiah bereputasi nasional dan internasional dan lain sebagainya.

6. Keberlanjutan

Kegiatan pengabdian masyarakat harus mampu berorientasi pada dampak (*outcome*) jangka panjang. Kegiatan pengabdian dapat pula dilakukan berulang-ulang pada komunitas yang sama sesuai dengan masalah yang muncul dan dihadapi di lapangan.

2.6 Indikator Keberhasilan

Dalam Buku Panduan Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kemristekdikti RI, terdapat 5 (lima) keluaran hasil pengabdian masyarakat, yaitu:

1. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. HKI, produk dan kemitraan;
3. Buku;
4. Mitra;
5. Luaran Iptek lainnya.

Berdasar pada lima jenis keluaran tersebut, maka indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIE Ahmad Dahlan Jakarta adalah:

1. Meningkatnya publikasi hasil pengabdian masyarakat;
2. Meningkatnya HKI, produk dan kemitraan hasil kegiatan pengabdian masyarakat;
3. Meningkatnya jumlah buku hasil pengabdian kepada masyarakat;
4. Meningkatnya jumlah mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Meningkatnya luaran iptek lainnya.



Sumber: Buku Panduan Penilaian Kinerja PPM Kemristekdikti RI, 2016

Gambar 2. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB III PETA JALAN PENGABDIAN MASYARAKAT

3.1 Isu-Isu Pengabdian Masyarakat

Spektrum isu kegiatan pengabdian masyarakat sangat luas. Dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan disebutkan bahwa agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) adalah: (1) mengurangi kemiskinan; (2) mengentaskan kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) mencapai pendidikan yang berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi yang layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan komunitas berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem laut; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.



Gambar 3. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan

Di Indonesia, isu SDGs tersebut diadopsi dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka menengah (RPJMN) maupun jangka panjang (RPJP). Dalam RPJMN 2015-2019 yang kemudian dikenal dengan Sembilan Agenda (*Nawa Cita*) menyebutkan bahwa agenda pembangunan Indonesia 2015-2019 adalah: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3)

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam RPJP Indonesia 2005-2025, isu-isu pembangunan kebangsaan mencakup antara lain: (1) pembangunan sosial budaya; (2) pembangunan sumber daya manusia; (3) pembangunan ekonomi; (4) pembangunan daerah; (5) pembangunan infrastruktur; dan seterusnya.

Oleh karena itu, isu-isu pengabdian masyarakat harus diarahkan pada kontribusi terhadap upaya pencapaian SDGs dan rencana-rencana pembangunan pemerintah. Sementara di tingkat lokal dan regional, terutama jika dikaitkan dengan kondisi geografis STIE Ahmad Dahlan Jakarta, maka isu-isu pengabdian harus mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di tingkat regional tersebut. Berikut ini adalah isu-isu strategis wilayah di mana STIE Ahmad Dahlan berada.

Tabel 4. Isu-Isu Strategis Sosial, Ekonomi & Budaya Tingkat Regional

Wilayah	Isu-Isu Strategis
DKI Jakarta ¹	1. Kemiskinan 2. Pendapatan daerah (pajak daerah) 3. Kesehatan 4. Pengelolaan sumberdaya air 5. Gender 6. UMKM (pedagang kaki lima) 7. Permukiman kumuh 8. Transportasi massal
Kota Tangerang Selatan ²	1. Kualitas sumber daya manusia 2. Pertumbuhan penduduk 3. Sarana dan prasarana wilayah 4. Perekonomian daerah (UMKM, perkoperasian dll) 5. Kemiskinan dan kesejahteraan sosial 6. Tata kelola pemerintahan 7. <i>Smart and Green City</i>
Kota Depok ³	1. Kualitas sumber daya manusia 2. Pertumbuhan penduduk 3. Penataan ruang 4. Perekonomian daerah 5. Kemiskinan dan kesejahteraan sosial 6. Tata kelola pemerintahan 7. <i>Smart and Green City</i>
Kabupaten Tangerang ⁴	1. Kemiskinan dan kesejahteraan sosial 2. Pertanian, perikanan, dan peternakan 3. Perekonomian daerah 4. Tata kelola pemerintahan
Kota Tangerang ⁵	1. Kualitas pendidikan 2. Kualitas kesehatan 3. Kemiskinan 4. Kesempatan kerja 5. Kualitas dan daya saing ekonomi lokal 6. Ruang kota berkelanjutan

7. Sistem transportasi
8. Banjir
9. Kualitas tata kelola pemerintahan

Sumber:¹RPJMD DKI Jakarta 2018-2022; ²RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021; ³RPJMD Kota Depok 2016-2021; ⁴RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018; ⁵RPJMD Kota Tangerang 2014-2018.

Kegiatan pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan 2019-2023 dikaitkan dengan seluruh isu tersebut, baik isu SDGs di level internasional, RPJMN, RPJP dan RPJMD di tingkat regional. Tujuan mengaitkan pengabdian masyarakat dengan seluruh isu tersebut tidak lain adalah bentuk kontribusi STIE Ahmad Dahlan Jakarta terhadap pembangunan di tingkat regional dan nasional. Ilustrasi keterkaitan isu-isu di tingkat internasional, nasional dan regional adalah sebagai berikut.



Gambar 4. Keterkaitan Antara Pola Ilmiah Pokok Pengabdian Masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta dengan RPJMD di Tingkat Regional, RPJMN & RPJP Tingkat Nasional, dan SDGs di Tingkat Internasional

3.2 Rencana Strategis

Rekomendasi Kemristekdikti RI perihal pengabdian masyarakat di masa mendatang adalah: (1) pendukung kemandirian bangsa; (2) sinergi implementasi tri dharma perguruan tinggi; (3) implementasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat; (4) nilai tambah dari luaran berbagai kegiatan pengabdian masyarakat; dan (5) peluang kerja sama nasional dan atau internasional. Selain itu, pengabdian masyarakat di masa depan adalah berbasis komunitas,

berbasis inovasi, berbasis wilayah (terutama di pulau-pulau terluar, di beranda depan atau perbatasan Indonesia), berbasis ekologis (berkelanjutan) dan berbasis kemandirian.

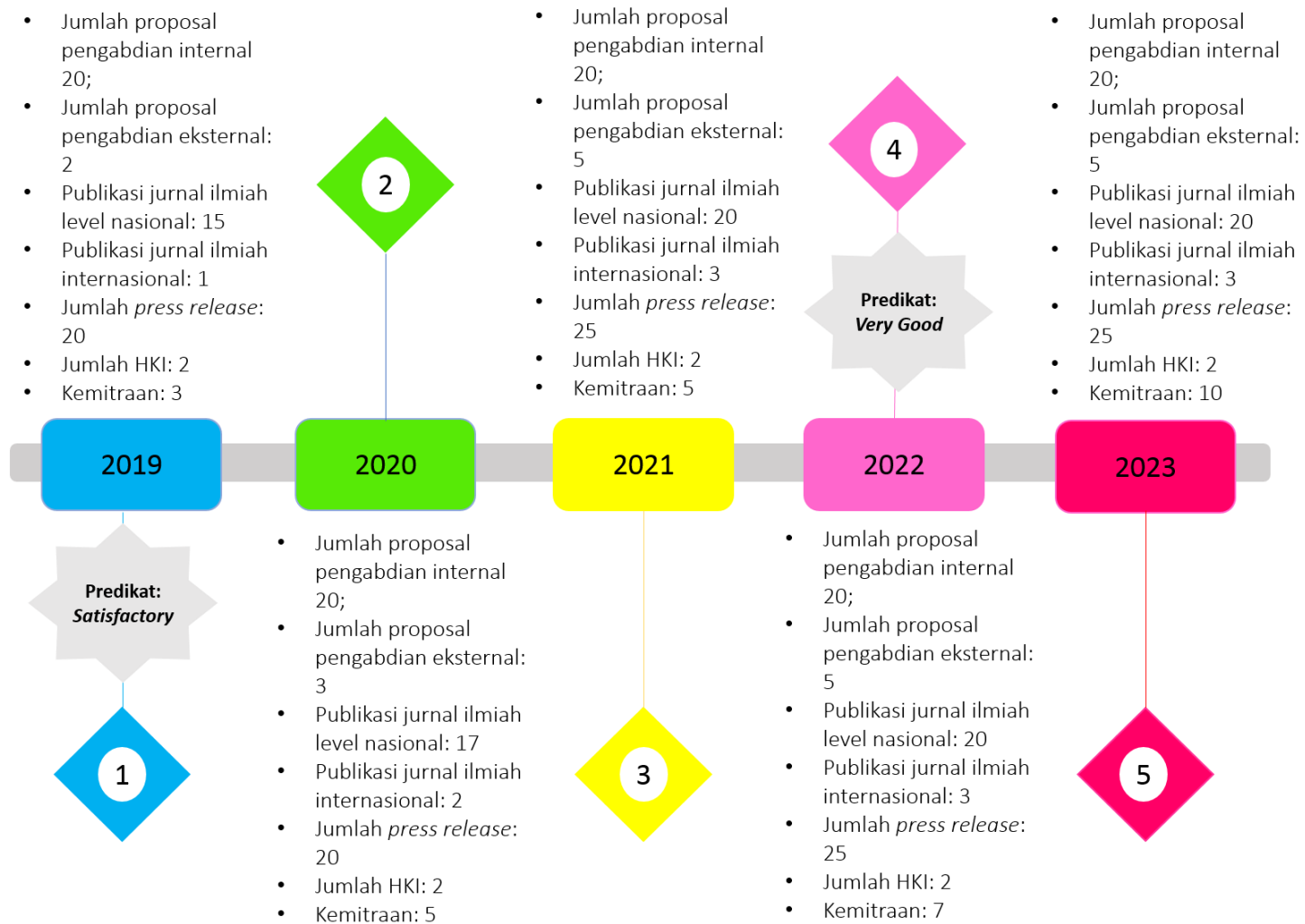
Selain itu, untuk mencapai standar minimal dan upaya pencapaian predikat terbaik dalam hal kinerja pengabdian masyarakat oleh Kemristekdikti RI, maka LP3M STIE Ahmad Dahlan menyusun 5 rencana strategis (program) sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat 2019-2023

No	Program	Kegiatan
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas proposal pengabdian masyarakat	1. Penambahan jumlah pendanaan (internal) pengabdian masyarakat; 2. Pelatihan penulisan proposal; 3. <i>Coaching clinic</i> penulisan proposal; 4. Pengiriman dosen dalam forum-forum ilmiah pengabdian masyarakat; 5. Pengiriman dosen dalam <i>workshop</i> penulisan proposal pengabdian masyarakat;
2	Peningkatan kuantitas publikasi hasil pengabdian masyarakat	1. Pelatihan/<i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah (nasional & internasional) hasil pengabdian masyarakat; 2. Pelatihan menulis <i>press release</i> hasil pengabdian masyarakat; 3. Pelatihan penyusunan profil daerah/pelaku usaha/komunitas hasil pengabdian masyarakat berISBN.
3	Peningkatan kuantitas perolehan HKI	1. Sosialisasi tentang prosedur pengurusan HKI; 2. <i>Workshop</i> HKI
4	Peningkatan kuantitas terbitan buku hasil pengabdian masyarakat	1. Menjalin kemitraan dengan penerbit buku; 2. Pelatihan penulisan buku.
5	Peningkatan jejaring kemitraan	1. Seminar; 2. <i>Visitasi, field trip</i>, kunjungan lapangan.

3.3 Peta Jalan Target Capaian

Berikut ini adalah peta jalan (*road map*) target capaian pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta 2019-2023.



BAB IV | PENUTUP

Berbagai standar minimal yang ditetapkan Kemristekdikti RI mengharuskan setiap perguruan tinggi harus melakukan berbagai adaptasi dalam merespons regulasi tersebut. Standar tersebut bukan hanya terkait dengan standar di bidang Pendidikan, tetapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat.

STIE Ahmad Dahlan Jakarta melalui Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat [LP3M] berupaya untuk memenuhi standar bidang penelitian dan pengabdian masyarakat melalui berbagai penataan kelembagaan secara maraton sejak tahun 2014. Dalam kaitan standar pengabdian masyarakat, terdapat delapan standar yang harus dipenuhi oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Salah satu standar tersebut adalah standar pengelolaan pengabdian masyarakat.

Dalam standar pengelolaan, Lembaga dituntut memiliki standar kelembagaan yang baik dalam upaya melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Satu dari sekian indikator untuk menilai kelaikan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat adalah lembaga tersebut memiliki *master plan* dalam bentuk dokumen rencana induk pengembangan pengabdian masyarakat yang dapat menjadi dasar pijakan pelaksanaan kegiatan masyarakat selama lima tahun yang akan datang.

Atas alasan itulah Rencana Induk Pengembangan [RIP] Pengabdian Masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta 2019-2023 ini disusun. Proses penyusunan dilakukan secara *bottom-up* dengan meminta pendapat para dosen atas isu-isu dan rencana kerja yang telah dirancang LP3M. Pelaksanaan rapat dengar pendapat telah dilakukan, dan LP3M telah menerima berbagai masukan demi menyempurnakan dokumen RIP ini. Dan kini, dokumen RIP telah sempurna dan siap menjadi dasar pengambilan keputusan kegiatan pengabdian masyarakat STIE Ahmad Dahlan Jakarta 2019-2023. Semoga dokumen RIP dan target-target capaian yang telah direncanakan di dalamnya dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

LP3M STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Pitri Yandri, SE., M.Si